ANALISIS KINERJA KECAMATAN ROWOKELE
TAHUN 2023

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah *perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU).* Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Kecamatan Rowokele telah menetapkan Indikator Kinerja Utama melalui Keputusan Camat Rowokele Nomor : 900/3/KEP/2023 tentang Indikator Kinerja Utama Kecamatan Rowokele. Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Kecamatan Rowokele tahun 2023 menunjukan hasil sebagai berikut:

Capaian Indikator Kinerja Utama
Kecamatan Rowokele Tahun 2023

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Capaian Kinerja (%)
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan RowoKele	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Rowokele	%	86.00	87,19	101,38
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA IKU					101,38

Rata-rata capaian indikator kinerja utama Kecamatan Rowokele pada tahun 2023 sebesar 101,38% atau bermakna Baik

3.3. Analisis Capaian Kinerja Kecamatan Rowokele Tahun 2023

Capaian kinerja didapat dari hasil pengukuran kinerja antara target yang telah ditetapkan dengan realisasi. Hasil kinerja Kecamatan Rowokele pada tahun 2023 mencapai 101,38 % atau bermakna Baik. Jadi secara umum Kecamatan Rowokele telah dapat melaksanakan tugas dengan baik dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra 2016-2021 untuk mendukung visi dan misi Pemerintah Kabupaten Kebumen.

3.4. Akuntabilitas Keuangan Kecamatan Rowokele Tahun 2023

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran atau target kinerja yang telah ditetapkan, Kecamatan Rowokele telah menetapkan Program yang merupakan bentuk instrument kebijakan yang dijabarkan dalam beberapa kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur.

Pada tahun 2023 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kebumen untuk Kecamatan Rowokele sebesar Rp.2.365.751.000,- (Dua Milyar tiga ratus enam puluh lima juta tujuh ratus lima puluh satu ribu rupiah) sedangkan realisasinya sebesar Rp.2.174.905.675,- (Dua Milyar Seratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus lima ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah) atau 91,93 %, dengan demikian dapat dikatakan tahun 2023 Kecamatan Rowokele ada sisa anggaran yang tidak terserap sebesar Rp.190.845.325,- (seratus sembilan puluh juta delapan ratus empat puluh lima ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah).

Adapun rincian realisasi anggaran Kecamatan Rowokele tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Realisasi Anggaran Kecamatan Rowokele
Tahun 2023

URAIAN JENIS BELANJA	ANGGARAN T.A. 2023	REALISASI T.A. 2023	PROSENTASE %
B. BELANJA			
Belanja Operasi			
1. Belanja Pegawai	1.974.352.000,-	1.787.090.019,-	90,52%
2. Belanja Barang dan Jasa	378.524.000,-	377.525.656,-	99,74 %
Jumlah Belanja Operasi	**2.352.876.000,-**	**2.164.615.675,-**	92%
Belanja Modal			
1. Belanja Modal Tanah	-	-	
2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin	12.875.000,-	10.290.000,-	79,92%
3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan	-	-	
4. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya			
Jumlah Belanja Modal	12.875.000,-	10.290.000,-	79,92%
JUMLAH BELANJA	**2.365.751.000,-**	**2.174.905.675,-**	**91,93%**

1. Realisasi Belanja per kegiatan

URAIAN JENIS BELANJA per kegiatan dan sub kegiatan	ANGGARAN T.A. 2023	REALISASI T.A. 2023	PROSENTASE %
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA			
Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat Daerah			
Penyusunan Dokumen perencanaan perangkat Daerah	1.315.000,-	1.315.000,-	100%
Evaluasi Kinerja perangkat Daerah	1.080.000,-	1.080.000,-	100%
Administrasi keuangan Perangkat Daerah			
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.958.132.000,-	1.770.870.019,-	90,44%
Pelaksanaan Panatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi keuangan SKPD	17.304.000,-	17.238.787,-	99,62%
Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Penyediaan komponen Instalasi Listrik / penerangan bangunan kantor	1.993.000,-	1.993.000,-	100%
Penyediaan Bahan Logistik kantor	18.900.000,-	18.899.400,-	99,99%
Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan	4.552.000,-	4.552.000,-	100%
Penyediaan Bahan Bacaan dan peraturan Perundang-undangan	2.000.000,-	2.000.000,-	100%
Penyediaan Bahan / Material	10.000.000,-	9.999.600,-	99,99%
Penyediaan Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD	740.000,-	740.000,-	100%
Penatausahaan Arsip dinamis pada SKPD	1.373.000,-	1.355.500,-	98,73%

Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah			
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12.875.000,-	10.290.000,-	79,92%
Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Penyediaan Jasa Surat menyurat	165.000,-	157.900,-	95,69%
Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan Listrik	34.936.000,-	34.584.877,-	98,99%
Penyediaan Jasa penyediaan Umum kantor	51.470.000,-	51.470.000,-	100%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan pemerintahan Daerah			
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya pemeliharaan Pajak dan Perizinan kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	55.000.000,-	54.542.892,-	99,16%
Pemeliharaan Peralatandan mesin Lainnya	4.500.000,-	4.500.000,-	100%
Program Penyelenggaraan pemerintahan Dan pelayanan Publik			
Pelaksanaan Urusan Pemerintahaan yang di limpahkan kepada camat			
Pelaksanaan urusan pemerintahan yng terkait dengan non perizinan	57.662.000,-	57.640.400	99.96%
Program Koordinasi ketentraman dan ketertiban Umum			
Program Penyelenggaraan urusan Pemerintahan umum			
Penyelenggaraan UrusanPemerintahan umum sesuai Penugasan Kepala Daerah			
Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan Nasional dalam rangka memantapkan Pengamalan Pancasila, pelaksanaan undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhineka Tunggal ika Serta Pemertahanan dan pemeliharaan Keutuhan Negara kesatuan Republik Indonesia	18.000.000,-	18.000.000-	100%
Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan Desa			
Fasilitasi Rekomendasi dan koordinasi Pembinaan dan pengawasan pemerintahan Desa			
Fasilitasi pengelolaan Keuangan Desa Dan pendayagunaan asset desa	18.000.000,-	17.985.500,-	99,91%
Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	1.125.000	1.125.000,-	100%
Fasilitasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan Daerah dengan pembangunan Desa	3.975.000,-	3.969.000,-	99,84%
Fasilitasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertibanUmum	4.518.000,-	4.518.000,-	100%
Fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan Partisipatif	16.675.000,-	16.674.900,-	99,99%
Fasilitasipenyusunan program dan peksanaan Pemberdayaan masyarakat Desa	63.461.000,-	63.004.600,-	99,28%
Koordinasi Pendampingan Desa di wilayahnya	6.000.000,-	5.999.900,-	99,99%
	2.365.751.000	**2.174.905.675**	**91.93%**

Hambatan yang dihadapi secara umum dalam pencapaian target anggaran yang telah ditetapkan pada tahun anggaran 2023 antara lain :

Anggaran Rp.2.365.751.000,- (Dua Milyar tiga ratus enam puluh lima juta tujuh ratus lima puluh satu ribu rupiah) sedangkan realisasinya sebesar Rp.2.174.905.675,- (Dua Milyar Seratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus lima ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah) atau 91,93 %,,

Anggaran tidak terserap penuh dikarenakan adanya pembulatan, pagu dan harga pasar tidak sama, pada sub kegiatan gaji dan tunjangan lainnya tidak terserap 100 persen.

